

## ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KENERJA KEUANGAN DAERAH DI KOTA KEDIRI

Diah Nurdiwaty, Badruz Zaman  
Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri  
E-mail: [ardh\\_olivia@yahoo.com](mailto:ardh_olivia@yahoo.com)

### Abstract

*The purpose of this study was to examine the factors that determine the profitability of the banks of the largest commercial banks nationwide in Indonesia for the period 2010-2014. Based on the prescribed criteria, banks selected as samples were Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia and Bank Mandiri. The dependent variable in this study is profit. The independent variables consist of liquidity risk, credit risk and efficiency. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The results showed that the liquidity risk of significant and positive impact on profits. Meanwhile, credit risk and efficiency significant and negative effect on profits. Concurrently, liquidity risk, credit risk and efficiency has a significant effect on earnings.*

**Keywords:** *Ratio of Independence, Effectiveness and Efficiency Ratio, Ratio of Activity, Growth Ratio, Financial Performance*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri jika dilihat dari rasio keuangan daerah yang meliputi: rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode lintas waktu (times series) dan metode lintas seksi (cross section) tentang analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah dinyatakan cukup baik, rasio kemandirian terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan dinyatakan tidak baik serta rasio efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik.*

**Kata Kunci:** *Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan*

Pada era reformasi di segala bidang saat ini, termasuk bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber keuangan daerah di pandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Anastasia, 2012).

Perubahan politik nasional yang sejalan dengan pergantian pemimpin telah memicu perubahan-perubahan penting di suatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud tertuang dalam kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah yang bercorak sentralis mengarah pada sistem pemerintahan yang desentralisasi.

Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud.

Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan asas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggung jawab. Optimalisasi pengelolaan dana publik diartikan bahwa daerah dituntut menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan menggunakan sumber daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas.

Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota, karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mampu mengurangi pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran, hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2012). Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2012). Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisa rasio keuangan daerah dapat digunakan pemerintah untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama

periode waktu tertentu (Anastasia, 2012).

Penggunaan analisis rasio keuangan daerah, yaitu berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan, namun analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping untuk menilai kualitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah juga seharusnya mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang mendukung perkembangan kegiatan fiskal, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar (Musgrave, 1993:6). Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep keuangan daerah yang dapat diterapkan adalah *value for money*.

*Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berarti dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas

berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Faktor kemandirian merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Halim (2007: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Kuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dapat dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Fungsi utama laporan keuangan adalah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun peranan laporan keuangan pemerintah menurut Batafor (2011) meliputi: akuntabilitas, manajemen, keseimbangan antar generasi (*inter generational equity*) dan transparansi. Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut Governmental Accounting Standart Board adalah untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik dan untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi.

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Sesuai UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh Kepala Daerah setidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Rasio Keuangan Daerah dapat dinilai melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan bisa diketahui jika

individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kinerja Pemerintah daerah seperti yang disampaikan Mahsun (2006:25) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Kinerja menurut Soedarmayanti (2006:25) meliputi beberapa aspek meliputi: kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya; ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan; semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung-jawabnya; kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik; komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis.

*Analisis Rasio Keuangan Daerah*, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim (2007:231) yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah menurut Halim (2007:232) adalah (1) DPRD sebagai

wakil dari pemilik daerah (masyarakat), (2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya, (3) Pemerintah Pusat/ Propinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, (4) Masyarakat dan Kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan saat ini adalah untuk menganalisis: kinerja keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD) Kota Kediri jika dilihat dari rasio kemandirian pada tahun anggaran 2009-2012; kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri jika dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi pada tahun anggaran 2009-2012; Kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri jika dilihat dari rasio aktivitas pada tahun anggaran 2009-2012; Kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri jika dilihat dari rasio pertumbuhan pada tahun anggaran 2009-2012.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran pada Pemerintah Daerah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini digunakan untuk menjawab hipotesis sebagai berikut:

H1: Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota

- Kediri sudah baik ditinjau rasio Kemandirian.
- H2: Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Asset Kota Kediri sudah baik ditinjau dari rasio Efektivitas dan Efisiensi.
- H3: Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri sudah baik ditinjau dari rasio Aktivitas
- H4 : Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri sudah baik ditinjau dari rasio Pertumbuhan.

Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD) Kota Kediri, untuk objek penelitiannya adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009-2012.

Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah teknik penelitian kausal, teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Rancangan atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kinerja Keuangan Daerah (Y) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya meliputi Rasio Kemandirian (X1), Rasio Efektivitas dan Efisiensi (X2), Rasio Aktivitas (X3), Rasio Pertumbuhan (X4).

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menetapkan konsep perhitu-

ngan rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, melalui perhitungan rasio dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2009-2012, dimana dilakukan dengan cara : pertama mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan metode lintas waktu (time series) dengan menghitung rasio keuangan, meliputi 1. Rasio kemandirian, rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah; 2. Rasio aktivitas, rasio aktivitas ( Rasio Keserasian) ini menggambarkan kondisi pemerintah daerah yang memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Adapun yang menjadi dasar perhitungan untuk rasio aktivitas ini adalah :

Rasio belanja rutin terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio belanja pembangunan =

$$\frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

(3) Rasio Pertumbuhan, rasio pertumbuhan (Growth Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk rasio

pertumbuhan belum terdapat patokan khusus namun apabila semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Adapun untuk mengetahui rasio pertumbuhan dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

*Kedua*, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan metode lintas seksi/ Industri (cross section) melalui perhitungan Rasio Efektivitas dan Efisiensi. (1) Rasio Efektivitas, rasio efektivitas dan efisiensi ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan Asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun kriteria efektivitas keuangan daerah sesuai Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 adalah Sangat Efektif (>100), Efektif (>90 – 100), Cukup Efektif (>80 – 90), Kurang Efektif (>60 – 80), Tidak Efektif (60).

(2) Rasio Efisiensi, rasio efisiensi ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Adapun dasar perhitungan yang digunakan adalah:

Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Adapun Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan sesuai Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 adalah Tidak Efisien (100% ke atas), Kurang Efisien, (90% - 100%), Cukup Efisien (80% - 90%), Efisien (60% – 80%), Sangat Efisien (Kurang dari 60%). Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

*Ketiga*, melakukan penilaian kinerja secara keseluruhan yang dicapai oleh pemerintah Kota Kediri yang dilihat dari hasil perhitungan rasio keuangannya.

Norma keputusan dapat dihitung dengan menggunakan metode lintas waktu (*time series*): Pertama, rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD). Jika  $RKKD X_n > RKKD X_{n-1}$ , maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik; b Rasio Aktivitas (RA), jika  $RA X_n > RA X_{n-1}$ , maka kinerja keuangan pemerintah dinyatakan baik; c Rasio Pertumbuhan (RP), jika  $RP X_n > RP X_{n-1}$ , maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik; 2. Norma keputusan dengan menggunakan metode lintas seksi/ industri (Cross Section); kedua, rasio efektivitas dan efisiensi (REfe dan REfi). Rasio Efektivitas (REfe), jika  $REfe > 1$  atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio Efisiensi (REfi), jika  $REfi < 1$  atau di bawah 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan baik.

Keterangan:  $RKKD X_n$  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode yang dihitung;  $RKKD X_{n-1}$  =

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode sebelumnya;  $RA X_n =$  Rasio Aktivitas pada periode yang dihitung;  $RA X_{n-1}$  = Rasio Aktivitas pada periode sebelumnya;  $RP X_n =$  Rasio Pertumbuhan pada periode yang dihitung;  $RP X_{n-1} =$  Rasio Pertumbuhan pada periode sebelumnya.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Kediri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian sangat baik. Saat terjadi peningkatan rasio kemandirian dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2009 sebesar 294,19%, 2010 naik menjadi 317,62%, dan tahun 2011 naik menjadi 1503,02%. Penurunan terjadi pada tahun 2012 menjadi 181,49%. Akan tetapi, dapat dikatakan selama periode 2009-2012 rasio kemandirian banyak mengalami kenaikan, jadi pada periode tersebut kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dapat dikatakan baik.

Kondisi tersebut di atas perlu dipertahankan agar di periode berikutnya tidak terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilakukan dengan cara adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah propinsi serta pinjaman dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah yang sah yang mengalami penurunan di tahun 2012. Dari hasil uji menggu-

nakan metode lintas seksi (cross section) diperoleh nilai rasio Efektivitas pada tahun 2009 – 2012 lebih besar dari 1 atau 100%, maka kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dinyatakan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri sangat efektif dalam merealisasikan dan melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan DPPKAD kota Kediri tahun 2009 sebesar 4,73%, 2010 sebesar 7,17%, 2011 sebesar 2,63% dan 2012 sebesar 2,45%. Hasil ini jika dilihat dari tingkat efisiensinya yaitu kurang dari 60%, menunjukkan kategori sangat efisien (60%-80%) Rasio efisiensi mengalami kenaikan tahun 2010, yang berarti adanya penurunan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya, dan mengalami penurunan tahun 2011 dan 2012 yang berarti peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode lintas industri (cross section) pada tahun 2009 - 2012 rasio efisiensinya kurang dari 1 atau di bawah 100% maka kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dinyatakan baik. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa selama periode penelitian yaitu periode 2009-2012 rasio efisiensi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dinyatakan baik.

Hasil perhitungan rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan diperoleh rasio aktivitas yang terdiri atas rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan. Untuk rasio belanja rutin tahun 2009 sebesar 21,22%, turun pada tahun 2010 menjadi 18,80%, tahun 2011 tidak mengalami penurunan

aataupun kenai-kan yaitu tetap 18,80%, dan tahun 2012 turun menjadi 8,69 %. Sedangkan rasio belanja pembangunan tahun 2009 sebesar 0,89%, 2010 sebesar 0,53%, 2011 sebesar 0,18% dan 2012 sebesar 0,74%.

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan masih relatif kecil dan menurun dari periode ke periode. Belum terdapat patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dengan menggunakan metode lintas waktu (*times series*) yang terdiri atas rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Rasio Pertumbuhan PAD

No	Tahun	Rasio
1	2009-2010	-12,67%
2	2010 - 2011	45,97%
3	2011 - 2012	6,58%

Tabel 2: Rasio Pertumbuhan Pendapatan

No	Tahun	Rasio
1	2009 - 2010	5,7%
2	2010 - 2011	1,13%
3	2011 - 2012	20,58%

Tabel 3: Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

No	Tahun	Rasio
1	2009-2010	-4,11%
2	2010 - 2011	-4,34%
3	2011 - 2012	-35,74%

Tabel 4: Rasio Belanja Pembangunan

No	Tahun	Rasio
1	2009-2010	-35,70%
2	2010 - 2011	-6,63%
3	2011 - 2012	459,26%

Hasil dalam bentuk angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan APBD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri pada Tahun Anggaran 2009-2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif, kecuali pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang negatif, begitu juga pertumbuhan Belanja Rutin, dan pertumbuhan Belanja Pembangunan menunjukkan pertumbuhan yang negatif, hanya pada tahun 2012 yang menunjukkan pertumbuhan yang positif.

## Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta hasil uji hipotesis dan pembahasan dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kinerja Keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian sangat baik sekali.

Kedua, kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam merealisasikan pendapatan asli daerah tergolong efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari rasio efektivitas yang naik dari tahun ke tahun yang berarti bahwa DPPKAD Kota Kediri sangat efektif dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan rasio efisiensi yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa terdapat

peningkatan kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri untuk tahun Anggaran 2009-2012.

Ketiga, kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan belum optimal dan sangat kecil sekali, hal ini dapat dilihat dari rasio aktivitas yang masih relatif kecil dari tahun ke tahun: Kelima, kinerja Keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tidak baik, hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami penurunan dari periode ke periode.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah untuk melakukan penilaian kinerja guna menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah. Dan sebaiknya lebih memprioritaskan lagi pengalokasian dananya untuk belanja rutin dan terlebih untuk belanja pembangunan sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Andi Melisa. 2012. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Makassar*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Program Studi Ilmu Akuntansi,

Universitas Sumatera Utara Medan

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

Mukaddas, A., 2013. Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri no. 13 tahun 2006 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 4(2), pp.131-150.

Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta

Rahayunita, Resty. 2013. *Pengaruh efisiensi Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Pasa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Motekar Majalengka*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung

Ulum, Ihyaul MD. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press. Malang.